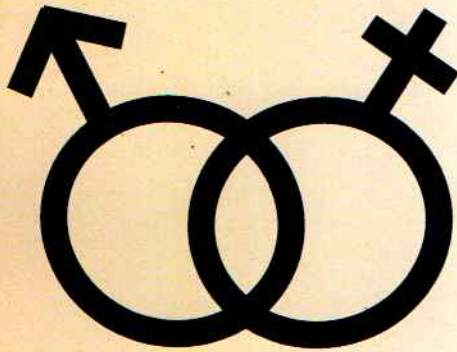


ISSN: 1978-810X

EL-MOSAWAT

JURNAL KAJIAN ILMIAH DAN GENDER

VOLUME V, NOMOR 2/ JUNI 2012



PUSAT STUDI WANITA (PSW)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
Jl. Agatis, Kampus STAIN Palopo, Telp. 0471-22076

DAFTAR ISI

Kawin Beda Agama dan Nasab Anak Menurut KHI <i>oleh A. Sukmawati Assaad</i>	1-6
Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin <i>oleh Fasiha</i>	7-24
Misi Kemanusiaan di Balik Peligami <i>oleh Muh. Darwis</i>	25-38
Pengaruh Bimbingan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Anak <i>oleh Abd. Muin Razmal</i>	39-56
Amts'al dalam Surah al-Baqarah <i>oleh Fauziah Zainuddin</i>	57-66
Pendidikan Akhlak Anak dalam Rumah Tangga <i>oleh Adilah Mahmud</i>	67-82
Snahib al-Hal dan I'rab-nya <i>oleh M. Amir Mula</i>	83-88
Problematisasi Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan <i>oleh Hilal Mahmud</i>	89-100
Manajemen Pendeiyagunaan Sumber Daya Pendidikan <i>oleh Alauddin</i>	101-110
Pendidikan sebagai Media Mobilitas Sosial <i>oleh Taqwa</i>	111-120
Pengaruh Renaissance terhadap Kebangkitan Eropa <i>oleh Baso Hasyim</i>	121-132
Dai Profesional <i>oleh Muhazzab Said</i>	133-150
Pandangan Teologi Islam tentang Perbuatan Manusia <i>oleh Kartini</i>	151-166
Perbedaan antara Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah <i>oleh Mustaming</i>	167-175

MISI KEMANUSIAAN DI BALIK POLIGAMI (Menyingkap Perlindungan atas Perempuan dan Anak Yatim)

oleh Muh. Darwis^{*}

Abstrak

Poligami merupakan salah satu persoalan yang menjadi tema pembicaraan al-Qur'an. Kajian ayat secara kontekstual ternyata melahirkan kesimpulan bahwa semangat ayat yang membolehkan poligami tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan seksual, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang banyak mewarnai rasionalisasi dan persyaratan yang dilakukan oleh para ulama. Sejatinya, kebolehan berpoligami lebih pada tujuan-tujuan sosial yakni melindungi dan memberikan pengayoman terhadap para perempuan, janda dan anak yatim. Kebijakan teologis ini direkomendasikan dalam rangka mengatasi satu problematika sosial yang terjadi pada masa Nabi (awal Islam) menyusul telah terjadinya beberapa rangkaian peperangan. Banyaknya anggota pasukan muslim yang gugur di medan perang menyisakan penderitaan ekonomi dan sosial bagi para isteri ataupun anak yang ditinggal mati suami ataupun ayahnya. Dari sudut ekonomi, mereka kehilangan penanggungnya, dan dari aspek sosial para janda masih dianggap rendah dalam masyarakat.

Kata-kata Kunci: poligami, ajaran Islam, kemanusiaan.

Pendahuluan

Ketika berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan, poligami merupakan satu topik yang tidak luput dari sorotan. Persoalan yang menarik dikaji dalam hal ini, ketidakselarasan antara tujuan ajaran Al-Qur'an dengan implikasi sosial yang ditimbulkannya. Sebagai bagian dari ajaran Al-Qur'an membenaran poligami, bahkan sampai empat orang isteri, (QS. An-Nisa (4): 3), semestinya memberikan dampak positif, baik pada individu maupun tatanan masyarakat. Ternyata faktanya tidak demikian, poligami justru menyengsarakan perempuan. Tanpa menafikan manfaat sosial yang mungkin ada, namun secara empiris, manfaat itu terlalu kurang dibanding mudharatnya yang ditimbulkannya. Banyak kasus yang ditemukan di lapangan bahwa poligami menyuguhkan suasana kehidupan yang menyedihkan terutama kepada perempuan dan anak-anak. Ini artinya, praktek yang diyakini berdasarkan ajaran Al-Qur'an kontraproduktif dengan idealitas yang ingin

^{*} Penulis adalah dosen pada Jurusan Syari'ah, STAIN Palopo.

diwujudkannya sendiri, yakni menciptakan kesejahteraan seluruh manusia.

Pada dasarnya, para ulama dan pemerintah menyadari dampak negatif poligami. Ini diindikasikan oleh usaha mereka meminimalisir terjadinya di dalam masyarakat. Usaha ulama dalam hal ini dapat dicontohkan dengan pengetatan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang hendak berpoligami, sementara pemerintah melakukannya dengan perumusan aturan-aturan yang bersifat membatasi, juga dengan syarat-syarat yang ketat. Di Indonesia misalnya, pengetatan ini pernah diusahakan secara struktural melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang menegaskan asas monogami terbuka yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Peraturan ini antara lain menegaskan kebolehan berpoligami, hanya saja perempuan PNS tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Juga Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah ini tidak melarang poligami akan tetapi mempersyaratkan adanya izin dari isteri. Hanya saja pada masa reformasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir peraturan pemerintah tersebut dianulir kembali.

Pengetatan syarat bolehnya berpoligami, lagi-lagi tidak menguntungkan kaum perempuan. Hampir semua syarat-syarat yang ditetapkan merepresentasikan kepentingan laki-laki. Syarat-syarat tersebut antara lain: a) poligami dibolehkan ketika isteri menderita penyakit akut sehingga ia tidak mampu melayani kebutuhan seksual suaminya, dan atau b) karena penyakit tersebut, sang isteri dipastikan tidak dapat memberikan keturunan, c) agar suami tidak melakukan perselingkuhan, agar suami tidak 'jajan di warung' yang rentan mengakibatkan Penyakit Menular Seksual (PMS), dan sebagai alternatif agar perempuan tidak dicerai. Selain itu, disyaratkan atas perizinan isteri dan kategorisasi keadilan; keadilan emosional dan keadilan rasional.¹

Demikianlah kenyataannya, pengarusutamaan kepentingan laki-laki dan marginalisasi kepentingan perempuan di sisi lain, merupakan fenomena umum yang terjadi di hampir setiap pembahasan tentang poligami. Di dalam kitab-kitab tafsir, fiqh, dan dalam percakapan sehari-hari sekalipun, poligami dibahas ataupun dirasionalisasikan berdasarkan kepentingan laki-laki, lebih spesifik lagi berdasarkan kepentingan seksual para suami. Rasionalisasi yang sangat patriarkhis ini menyeret kita berhadapan dengan pertanyaan teologis tentang keadilan Tuhan "Apakah adil, Tuhan mengorbankan kepentingan perempuan demi kepentingan laki-laki? Apakah adil, seorang perempuan ditinggalkan dengan beban psikologis yang ditanggungnya untuk memenuhi

¹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, h. ; Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian* (Jakarta: Lentera Hati), h. 12

kebutuhan dan kesenangan biologis laki-laki? Apakah adil mencaipkan perempuan yang sakit akut hanya untuk kesenangan seksual laki-laki?

Sejatinya, rumusan syarat-syarat yang diberlakukan dalam membolehkan poligami selama ini menyimpang dari semangat dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an turun dalam rangka membela kepentingan perempuan yang sebelumnya mengalami ketertindasan akibat dominasi laki-laki (budaya patriarkhi). Bagaimana menjelaskan pernyataan yang berbeda dengan pandangan masyarakat umum ini?

Paragraf-paragraf di bawah mencoba mengulas bagaimana Al-Qur'an mengungkap soal poligami. Hal ini sama sekali bukan dengan tujuan mengharamkan yang dihafalkan oleh Allah ataupun sebaliknya, *naudzu billah*. Akan tetapi, tulisan ini berusaha mencoba mendudukan kebolehan tersebut secara proporsional. Mengembalikan ayat kepada semangat aslinya.

Poligami dalam Tradisi Jahiliyah

Dalam rangka mencari semangat sebuah atau sekelompok ayat, konteks sosio-historis tidak boleh dipisahkan dari bagian metodologi. Faktor ini selalu dibutuhkan sebab ia merupakan satu dari dua kutub yang terlibat dalam proses dialektika; Al-Qur'an di satu sisi dan konteks sosial di sisi lain.² Kontek yang dimaksud dalam hal ini bukan sebatas keterangan-keterangan yang menceritakan peristiwa-peristiwa tertentu yang melatari turunya ayat, atau yang lazim disebut *asbab an-nuzul*. Jika terbatas pada hal itu saja maka kendala metodologis yang tak teratasi seringkali dijumpai mengingat ayat-ayat yang turun tanpa disebabkan kasus khusus jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang turun dengan sebab, yang terakhir inipun masih harus dipilah karena seperti yang disinyalir banyak pihak, hanya sekitar 10 persen dari riwayat *asbab an-nuzul* yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kontek yang dimaksud di sini meliputi tradisi dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. Sekiranya kedua konteks ini harus dikategorikan dengan istilah khusus masing-masing, maka yang pertama (*asbab an-nuzul*) distilahkan dengan kontek mikro, dan yang kedua adalah konteks makro.

Catatan sejarah menuturkan bahwa di dalam masyarakat Arab Jahiliyah poligami merupakan satu hal yang sangat biasa. Seorang laki-laki bebas menikahi perempuan sejumlah yang ia inginkan. Batasan untuk melakukan

²Nashr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulum Al-Qur'an*, Terjemahan oleh Khoiron Nadhliyyin dari *Mafhum an-Nash; Dirasah fi Ulum Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LkiS), 2000, h.117.

poligami, kalau pun ada, dipastikan tidak mempunyai sangkut paut dengan ideologi, akan tetapi lebih karena keterbatasan kemampuan dalam hal ekonomi. Dengan demikian, tidak salah jika dikatakan bahwa poligami bahkan merupakan bagian dari aspek prestesius laki-laki. Mereka yang mempunyai banyak isteri dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam starata sosialnya.

Seperti yang dikutip oleh Enggineer dari At-Thabari -seorang mufasir dan sejarawan yang sangat populer di kalangan Islam- bahwa seorang anggota Quraisy rata-rata mempunyai sepuluh orang isteri, mereka sering berkata 'siapa yang dapat menghalangiku untuk menikahi perempuan lebih banyak lagi.'³ Lebih dari itu, ia juga menukil dari *Kitab al-Agani* beberapa contoh bahwa pada masa pra-Islam, laki-laki menikahi tujuh puluh tiga, sembilan puluh, bahkan sampai lima ratus perempuan.⁴ Walaupun data ini mengandung unsur hiperbolik, setidaknya ia dapat dipahami bahwa pada masa itu ada kecenderungan dalam masyarakat bersaing dalam hal jumlah isteri.

Budaya berpoligami yang begitu marak tidak luput dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan atau tindakan-tindakan eksploitatif. Para penguasa suku atau kabilah memanfaatkan institusi poligami untuk keperluan-keperluan politik. Jumlah isteri sangat berpengaruh pada upaya perluasan 'hubungan diplomatik, karenanya, perkawinan dalam hal ini difungsikan sebagai ajang untuk membangun aliansi politik dengan suku atau kabilah yang lain. Poligami juga kadang-kadang dilakukan dalam rangka menguasai harta seseorang, baik ia adalah seorang janda ataupun anak yatim.

Selain aturan poligami, ketidakberdayaan perempuan semakin lengkap dengan aturan perceraian yang berlaku. Sebagaimana poligami perceraian pun dapat dijatuhkan oleh laki-laki berdasarkan keinginannya, baik dengan alasan yang jelas maupun tanpa dengan alasan.

Kondisi seperti ini masih berlanjut pada masa awal Islam. Sejarah mencatat bahwa pada masa itu, masih banyak orang-orang yang telah menyatakan diri masuk Islam (mukmin) mempunyai lebih dari empat isteri. Al-Harits bin Qis misalnya, mempunyai delapan orang isteri, Naufal bin Mu'awiyah mempunyai lima orang dan tentu saja masih banyak kasus-kasus yang serupa.⁵ Dalam konteks makro seperti inilah ayat-ayat poligami diserukan.

³Asgar Ali Enggineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan oleh Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf, dari *The Rights of Women in Islam*. (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), h. 33.

⁴*Ibid.*, h. 34.

⁵*Ibid.*

Asas Legalitas Poligami

Di dalam Al-Qur'an diketemukan dua ayat mengenai poligami. Kedua ayat tersebut masing-masing QS. An-Nisa/4: 3 dan 129. Ayat pertama menjelaskan kecilnya peluang untuk melakukan poligami, sementara ayat yang kedua menjelaskan kondisi yang sangat spesifik peluang tersebut. Makna kedua ayat tersebut dipaparkan sebagai berikut:

"Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(3)

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(129)

Legalitas poligami selalu merujuk pada frase yang berbunyi "kawinilah wanita-wanita yang engkau senangi: dua, tiga, empat". Frase ini seolah diposisikan sebagai pernyataan independen, artinya sebuah pernyataan yang terlepas dari konteks historis dan dari kelanjutan redaksinya. Syarat yang disebutkan sesudahnya 'keadilan' diabaikan. Dalam masyarakat kita, tidak jarang kita dengar – sengaja atau tidak – ayat ataupun terjemahannya dilafalkan hanya sampai pada kata 'rubā' (empat). Semua ini mengarahkan pada kesimpulan kebolehan berpoligami sampai empat isteri. Asas legalitas lain yang sering diajukan untuk mendukung kebolehan poligami adalah poligami Rasulullah. Dalam *as-sirah an-nabawiyah* dituturkan bahwa beliau mempunyai sembilan orang isteri.⁶

Dalam ilmu balaghah, *uslub amar* (*direction style*), kata *fankihu* termasuk dalam kategori *al-amr yakhruj an ma'nahu al-ashliyy* (perintah yang menyimpang dari makna aslinya). Makna asli perintah adalah tuntutan pem-

⁶Jumlah Isteri Nabi diperselisihkan. Yang mayshur disebutkan sembilan orang. Namun, menyebutkan angka yang lain. Muhammad Ali as-Sabuni misalnya menyebutkan 11 orang, mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zuh'ah, Aisyah binti Abi Bakar, Hafshah binti Umar, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Hazimah, Ummu Salamah (Hindun binti Abi Umayyah: al-Mahzumiyyah) Ramlah binti Abi Sufyan (Ummu Habibah), Maimunah binti al-Haris, Juwairiyah binti al-Haris, dan Sufiyah binti al-Husayy. Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid II (Jakarta: Dinamika Berkah Utama), h. 328

bicara selaku atasan agar lawan bicara sebagai bawahan melakukan satu perbuatan. Uslub perintah yang dapat diartikan demikian adalah uslub perintah yang independen; tidak terkait dengan syarat apapun, atau perintah yang dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan. Perintah dalam ayat ini tidak mungkin diartikan demikian karena adanya syarat yang harus dipenuhi, yakni kemampuan berbuat adil. Oleh sebab itu perintah ini lebih memungkinkan diartikan sebagai larangan atau ancaman. Bagi para mufassir yang mengkaji ayat ini dari sisi kebahasaan, keberadaan syarat setelah amar menunjukkan arti ketidakmampuan. Dari kajian ini hasilnya, sudah cukup memberikan pemahaman bahwa poligami tidak dibenarkan pada segala kondisi. Persyaratan harus berbuat adil kepada dua atau lebih isteri merupakan syarat berat untuk ditunaikan. Dengan demikian poligami hanyalah sebuah pintu kecil.

Pada ayat yang kedua, keadilan yang dijadikan syarat dinegasikan oleh Allah 'kalian tidak akan dapat berbuat adil meskipun sangat menginginkannya'. Negasi di dalam ayat ini menggunakan kata *lan*, yang dalam Bahasa Arab menunjukkan arti kemustahilan terjadinya sesuatu. Maka dari itu, ketika kemampuan berbuat adil yang dijadikan syarat, lalu keadilan itu sendiri dinafikan, maka kesimpulan yang lurus adalah pintu kecil untuk melakukan poligami sebenarnya telah tertutup. Pertanyaannya kemudian, apakah pintu kecil tersebut tertutup untuk selamanya?

Para cendekiawan muslim berbeda pendapat dalam hal ini. Muhammad Abduh, nampak cenderung menyatakan bahwa boleh saja seorang laki-laki kawin lebih dari satu tetapi harus memenuhi syarat adil, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 3 surah al-Nisa'. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa syarat adil ini sesungguhnya teramat susah – untuk tidak menyebut mustahil – dicapai seorang laki-laki. Keadilan yang dimaksud meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan, dan hubungan suami-isteri. Hal lain yang patut dijadikan pertimbangan bahwa dampak poligami pada umumnya membawa bencana terhadap kehidupan rumah tangga. Semua ini mengarah pada kesimpulan bahwasanya poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam.⁷

Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami. Poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai agama serta adat istiadat masyarakat sebelumnya. Ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang amat membutuhkannya saja dan dengan syarat yang

⁷Lihat Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 18-20.

tidak ringan.⁸ Angka-angka yang disebutkan, lanjut Quraish Shihab, mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda". Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak memakan makanan tertentu.⁹

Pendapat yang lebih tegas dikemukakan oleh Abu Zahrah. Ia memahami bahwa Al-Qur'an pada dasarnya melarang poligami. Dalam hal ini, ia menaperhadapkan kedua ayat tersebut, seolah-olah ingin mengatakan bahwa ayat 129 menasakh ayat 3 terdahulu. Bilangan dua, tiga, dan empat dalam ayat tersebut, menurutnya, bukan jumlah yang dapat direalisasikan tetapi pada hakikatnya melarang, seperti sindiran orang Arab: *if'al ma syi'ta* (kerjakanlah sekehendak hatimu) artinya jangan lakukan perbuatan itu.¹⁰

Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah juga tidak menunjukkan bahwa poligami dibolehkan dalam segala kondisi. Nabi berpoligami setelah ia bermonogami hingga usianya mencapai limapuluh tahun lebih bersama Khadijah. Diantara perempuan yang dinikahinya, hanya dua yang masih gadis, selebihnya adalah janda –bahkan sudah uzur. Artinya, Mereka bukanlah perempuan-perempuan yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat. Kesemuanya dinikahi dengan tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan perempuan yang kehilangan suami.¹¹

Alasan lain yang dapat dikemukakan ialah kalau sejak semula Islam menganut prinsip poligami mengapa Tuhan menciptakan hanya seorang Adam dan seorang Hawa lalu keduanya menjalin hubungan perkawinan, dengan kata lain, mengapa Tuhan tidak menciptakan beberapa Hawwa untuk seorang Adam. Kenyataan ini membuktikan bahwa institusi ideal sebuah perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan, lagi pula ayat pertama dari surah al-Nisa' tadi menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya diciptakan dari unsur yang sama, *nafs wahidah*.

Penolakan terhadap kebolehan berpoligami dengan keras datang dari Mahmud Muhammad Thoha. Dalam bukunya *the Second Massage* dengan tegas menyatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam. Thoha dalam hal ini tidak menafikan realitas tradisi dan budaya Arab yang berlangsung sebelum

⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati) h. 327.

⁹*Ibid.*

¹⁰Muhammad Abu Zahrah., *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h.70.

¹¹Quraish Shihab, *op.cit.*, Jilid II, h. 327.

kedatangan Islam. seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa poligami merupakan bagian penting dari tradisi mereka. Dengan demikian sangat beralasan jika Thoha kemudian menyatakan bahwa poligami merupakan perpanjangan tradisi Arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan terhadap laki-laki (*male-centris*).¹² Menurutny, pandangan dan prinsip murni Islam dalam hal perkawinan adalah monogami yakni perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam pandangannya, syariat Islam, ibaratnya sebuah bangunan yang didirikan secara bertahap (*gradual*). Pembenaan poligami pada masa awal Islam seperti yang tercantum di dalam surah 4: 3 harus dipandang sebagai satu tahapan dari proses transisional menuju ke kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara penuh. Karena faktor kondisi sosial menuntut tahapan ini harus dilalui.¹³

Pandangan Thoha ini ada benarnya. Berdasarkan catatan historis, tidak ada yang dapat menyangkali buruknya perlakuan laki-laki terhadap perempuan. Kebiasaan berpoligami sampai batas yang tidak ditentukan merupakan bagian dari perlakuan buruk itu, dan menjadi warna yang sangat kental serta mengakar di dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sungguh tidak tepat jika Al-Qur'an menghapuskan poligami secara frontal. Dapat dibayangkan, apa yang terjadi sekiranya Islam yang sedang dalam berjuang meraih simpati, tiba-tiba menghapuskan sarana kesenangan laki-laki yang pada konteksnya sebagai kelompok yang dominan dalam berbagai hal.

Kronologi turunya ayat-ayat Al-Qur'an mengenai poligami yang jumlahnya tak banyak, mendukung pandangan Thoha. QS. 4: 3 turun lebih dahulu dari pada QS. 4: 129. Kronologi ini menggambarkan langkah sistematis dan strategi yang jitu dalam menghapus kebiasaan bejat yang sudah mengakar. Dengan kata lain kronologi ini menggambarkan satu proses evolusi.

Syarat-syarat Poligami; Interpretasi vs Semangat Qur'ani

1. Potret Kepentingan Seksual Laki-Laki

Islam datang dengan semangat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Ia sejak awal dipromosikan sebagai agama pembebasan dari berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pembebasan terhadap perempuan. Semangat ini pada dasarnya selalu terintegrasi pada setiap aturan-aturannya termasuk di dalam ayat-ayat yang mengatur tentang poligami.

¹² Asgar Ali Engineer, *op.cit.*, h. 34.

¹³ Mamud Muhammad Thoha, *op.cit.*, h. 204.

Pembacaan yang dilakukan oleh para ulama melahirkan interpretasi yang jauh dari semangat itu. Ayat ini dibahas berdasarkan paradigma patriarkhi sehingga semangatnya dalam membela perempuan terdistorsi. Seperti yang terlihat di awal bahwa bahasan mengenai syarat poligami menampilkan potret kepentingan seksual laki-laki. Seolah-olah pemenuhan nafsu seks adalah satu hal yang tidak boleh ditawar-tawar.

Alasan-alasan yang berangkat dari kepentingan laki-laki ini tidak lahir sekiranya kontek ayat –makro dan mikro– diperankan. Sumber-sumber otoritatif menuturkan bahwa Ayat 4: 3 di atas turun dalam suatu kondisi masyarakat yang betul-betul krisis, karena baru saja umat Islam mengalami rangkaian perang yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Sesuai dengan tradisi perang di Jazirah Arab, yang bertanggung jawab untuk urusan perang adalah kaum laki-laki, maka praktis sejumlah wanita menjadi janda dan dengan sendirinya populasi anak yatim piatu makin banyak.¹⁴ Dalam Perang Uhud saja, 70 dari 700 laki-laki terbunuh. Dipastikan, pembengkakan jumlah janda dan anak yatim merupakan eksekusi yang langsung dirasakan ummat. Sumber lain menyebutkan bahwa populasi umat Islam di masa-masa awal permulaan Islam lebih besar jumlah perempuan daripada laki-laki. Di antara 500 orang hanya terdapat seperlima laki-laki yang dapat menggunakan senjata. Selebihnya adalah perempuan dan anak-anak.¹⁵ Pembengkakan jumlah janda dan anak yatim ini oleh Abdul dipandang sebagai problema sosial yang serius yang dihadapi masyarakat kala itu. Dengan demikian pembolehan poligami merupakan solusi atas problema tersebut. Semua ini menegaskan bahwa kebolehan berpoligami bukan hukum primer. Artinya, kebolehan berpoligami tidak pada kondisi (umum) kapan saja seorang laki-laki menginginkannya. Jika dikaitkan dengan metodologi yang dikembangkan oleh Asgar, ayat ini merupakan pernyataan tekstual sedangkan nilai normatif yang harus diinternalisasikan tidak lain dari pengayoman para janda dan anak yatim.

Riwayat mengenai sebab turunnya ayat (*asbab nuzul al-ayat*) juga menafikan relevansi ayat ini dengan aspek pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki. Sebuah riwayat yang bersumber dari Aisyah – diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Turmudzi – menuturkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali

¹⁴Nasaruddin Umar, *jurnal*, *op.cit.*, h. 64.

¹⁵W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press), 1990, h. 3.

senang akan kecantikan dan harta sang yatim. Kemudian sang wali hendak mengawini si yatim itu tanpa memberikan mahar yang sesuai.

Dari uraian mengenai kontekstual historis ayat menunjukkan bahwa – di luar kesadaran hampir semua orang – ternyata konteks ayat ini berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial perempuan dan anak-anak yatim. Artinya bahwa poligami dibolehkan dalam rangka melindungi perempuan (janda) dan anak yatim/terlantar.

Sampai di sini tentunya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Sekiranya benar poligami tidak ada relevansinya dengan masalah kebutuhan seksual laki-laki, maka apa solusi yang ditawarkan Islam untuk itu? Hal ini sangat penting karena pengetatan syarat berpoligami atau melarangnya sama sekali, sering diidentikkan legalisasi perzinahan. Bagi mereka poligami adalah solusi untuk menghindari perzinahan.

Terhadap posisi dilematis yang mungkin muncul ini, Aminah Wadud Muhsin memberikan bantahan sebagai berikut:

Alasan untuk berpoligami seperti ini selain tidak mempunyai sandaran di dalam Al-Qur'an, jelas-jelas juga tidak qur'ani karena berusaha menyekutui nafsu laki-laki yang tidak terkendali, yakni jika kebutuhan suami tidak dapat terpuaskan oleh seorang isteri maka ia boleh mempunyai dua, tiga dan seterusnya. Isteri sejak awal diisyaratkan untuk mengendalikan diri dan setia, maka kebijakan moral ini juga penting untuk laki-laki. Al-Qur'an jelas tidak menekankan pada satu tingkat yang tinggi dan beradab untuk perempuan sementara membiarkan laki-laki berinteraksi dengan yang lain pada tingkat yang paling hina.

Bahwa poligami lebih baik daripada berzinah tidak mungkin dipungkiri. Akan tetapi, poligami untuk menghindari zinah bukan alternatif tunggal, dan yang lebih penting tidak ada dasarnya dalam teks. Alternatif lain yang mungkin lebih islami adalah bersabar untuk tidak melakukan hubungan seks. Sikap ini mengantar suami untuk tidak melihat poligami sebagai solusi menghindari zinah. Dengan demikian, ketika kondisi tersebut muncul suami dihadapkan dua alternatif. Pertanyaannya kemudian, alternatif mana yang lebih patut dipilih?

Alternatif yang pertama susah dibenarkan. Alternatif ini berangkat dari asumsi yang keliru, yakni memandang hasrat seksual laki-laki sebagai satu hal yang harus dipenuhi. Padahal, dari sudut pandang agama ternyata tidak demikian. Ada kemungkinan seorang laki-laki menahan nafsu seksualnya. Kemungkinan ini terlihat dalam sebuah hadis yang menyeru kepada para pemuda yang belum mapu menikah untuk berpuasa, dan ini tidak menghasilkan dampak-dampak negatif secara biologis. Di sisi lain, poligami

dipastikan membawa dampak psikologis terhadap isteri karena ia menyalahi prinsip kesetiaan dan janji untuk saling membagi suka dan duka.

Alternatif yang kedua jauh lebih baik dan lebih bijaksana. Dikatakan lebih baik, karena menahan nafsu seks (tidak berzinah) maka ia akan mendapatkan pahala. Dalam perspektif hukum Islam, menghindari perbuatan haram akan mendapatkan pahala. Poligami memang bukan perzinahan dan tidak ada larangan tegas untuk itu. Akan tetapi oleh Allah dijelaskan sebagai anal di mana seorang laki-laki tidak mungkin dapat berbuat adil, dan ketidakadilan itu sendiri diidentikkan dengan kecurangan. Ini berarti poligami lebih dekat pada dosa. Kemudian dikatakan lebih bijaksana, karena dengan menahan nafsu seks baik dalam bentuk menghindari perzinahan atau pun dalam bentuk poligami, lebih menjamin ketenangan sang isteri, karena dengan demikian ia terhindar dari kekerasan dan beban psikologis.

2. Keinginan Memperoleh Keturunan

Mendapatkan keturunan merupakan bagian dari tujuan perkawinan. Karena itu, kehadiran seorang anak sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Dari sini muncul alasan melakukan poligami yakni ketika seorang isteri dipastikan tidak mampu memberikan keturunan. Dalam masyarakat kita bukan hanya di madu, tetapi dengan alasan yang sama banyak perempuan yang dicerai oleh suaminya. Lebih ironis lagi, perempuan seringkali dipojokkan oleh perempuan sendiri. Karena 'ngebet' ingin menimang cucu, seorang ibu seringkali memaksa anaknya untuk kawin dengan perempuan lain yang diyakini lebih subur dan dapat memberikan keturunan.

Kaitannya dengan ini, Aminah Wadud mengatakan bahwa poligami dengan alasan kemandulan isteri tidak ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Namun demikian, lanjutnya, keinginan untuk memiliki dan merawat anak merupakan hal yang alami baik oleh perempuan maupun laki-laki. Karena itu, kemandulan baik laki-laki dan atau perempuan semestinya tidak menghilangkan kesempatan untuk itu. Di dunia yang sedang porak poranda ini, terdapat banyak anak yatim dan anak-anak terlantar yang menantikan uluran cinta dan kasih sayang.

Solusi ini tentunya tidak sepenuhnya memberikan kepuasan, utamanya bagi yang sehat. Bagaimanapun juga, ikatan jiwa dengan anak kandung berbeda dengan yang lain. Kebahagiaan mempunyai anak kandung pasti lebih daripada kebahagiaan karena dengan hanya mempunyai anak angkat (adopsi). Akan tetapi, dari sudut lain, ini merupakan satu wujud pengorbanan yang sangat mulia. Disamping membuktikan kesetiaan pada pasangan, yang sedari awal sudah dijanjikan, merawat dan memelihara anak yatim sendiri merupa-

kan bagian dari kebajikan yang utama. Rasanya sungguh bijaksana 'kemalangan' yang menimpa pasangan dirubah menjadi sikap ihsan seperti ini.

Terlepas dari solusi di atas, harus di akui bahwa memiliki dan merawat anak (kandung) adalah idaman setiap pasangan suami isteri. Dan ini adalah keinginan yang mulia. Akan tetapi perlu dijelaskan kembali bahwa di dalam agama, kemuliaan sebuah tujuan terkait dengan cara pencapaiannya. Keinginan mempunyai anak secara substantif tidak mungkin disalahkan. Akan tetapi, tujuan yang mulia tidak sampai membenarkan segala cara termasuk mengorbankan atau menyakiti orang lain. Mendapatkan anak dengan cara berpoligami dipastikan mengakibatkan penderitaan psikologis isteri pertama. Alasan lain bahwa memelihara atau menyelamatkan yang hidup lebih baik dari pada yang belum hidup. Dalam fiqh misalnya, ketika terjadi pilihan antara menyelamatkan kehidupan seorang ibu dengan keselamatan janin yang sedang dikandung, maka pilihannya jatuh pada ibu, apakah analogi ini tidak dapat diterapkan dalam hal ini?

3. Kategorisasi Keadilan

Kiat yang seringkali ditempuh dalam rangka melonggarkan atau memperlebar pintu ini antara lain kategorisasi keadilan menjadi keadilan rasional dan keadilan emosional. Kemudian ditegaskan bahwa keadilan yang dinyatakan tidak mungkin diwujudkan oleh laki-laki (suami) meski dengan usaha ekstra keras adalah keadilan emosional. Kongkritnya bahwa dalam pemenuhan kebutuhan finansial misalnya, keadilan itu mungkin saja diwujudkan, akan tetapi hal yang berkaitan dengan perasaan suka, cinta dan aspek emosional lainnya akan selalu menyisakan kecenderungan pada salah satunya entah kepada isteri muda ataupun kepada isteri tua. Pemahaman ini didasarkan pada indikasi bahwa ayat ini tidak berhenti pada negasi kemampuan berbuat adil, akan tetapi dilanjutkan dengan larangan menunjukkan ketidakadilan emosional itu secara demonstratif.

Kategorisasi keadilan pada penjelasan di atas, bahkan sampai pada pernyataan bahwa keadilan yang dinegasikan adalah keadilan emosional dapat diterima. Akan tetapi 'poligami sebagai pintu kecil' yang lahir dari interpretasi berdasarkan konteksnya tidak boleh ditinggalkan. Ketika konteks yang serupa terjadi kembali di dalam masyarakat – dimana banyak janda dan anak yatim yang membutuhkan pengayoman, dan akan melahirkan eksese buruk sekiranya hal itu diabaikan – maka poligami dapat dibenarkan. Namun hal ini harus disertai dengan beberapa catatan penting yakni; *pertama*, mereka yang ingin berpoligami harus dengan niat yang tulus untuk mengayomi perempuan bukan dengan tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki, *kedua*, dipastikan tidak ada protes dari isteri pertama, *ketiga*,

keyakinan akan mampu berbuat adil dalam arti keadilan rasional. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, keadilan emosional yang dinafikan di dalam ayat terakhir ini dapat ditolerir sepanjang tidak dilakukan secara demonstratif.

Dari uraian di atas dengan jelas terlihat bagaimana keberpihakan al-Qur'an terhadap perempuan dan anak yatim. Kendati demikian ayat ini tidak berarti anti terhadap laki-laki. Sebagai kalam ilahi, al-Qur'an memberikan pembelaan terhadap perempuan tanpa mengorbankan laki-laki. Harus disadari bahwa monogami selain untuk tidak menyensasikan perempuan dan agar tidak melahirkan anak-anak terlantar juga demi untuk meringankan beban laki-laki. Kata *ta'uuluu* terambil dari kata *'aala ya'uulu* yang berarti menanggung/membelanjai. Artinya, dengan menikahi seorang perempuan saja maka tanggungan kamu tidak berat. Dapat pula berarti, karena hanya menikahi satu orang maka bila memperoleh keturunan maka hal itu tidak memberatkan beban kamu. Dari sini, Quraish Shihab, melihat bahwa ayat ini dapat dijadikan dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi.¹⁶

Penutup

Kebolehan berpoligami sebagai diungkap secara tekstual di dalam Al-Qur'an, hanyalah sebuah pintu kecil yang mungkin dilewati pada kondisi yang sangat khusus. Hal ini pada dasarnya diakui para ulama terdahulu. Terbukti dengan syarat-syarat yang ketat untuk melakukan poligami. Hanya saja, syarat-syarat yang ditetapkan itu lebih berpihak pada kepentingan laki-laki sehingga ia melenceng dari semangat ayat yang sesungguhnya.

Kajian ayat secara kontekstual ternyata melahirkan kesimpulan bahwa semangat ayat yang membolehkan poligami tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan seksual baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang banyak mewarnai rasionalisasi dan persyaratan yang dilakukan oleh para ulama. Sejatinya, kebolehan berpoligami lebih pada tujuan-tujuan sosial yakni melindungi dan memberi pengayoman terhadap para perempuan, janda dan anak yatim. Kebijakan teologis ini direkomendasikan dalam rangka mengatasi satu problematika sosial yang terjadi pada masa awal Islam menyusul terjadinya beberapa rangkaian peperangan. Banyaknya anggota pasukan muslim yang gugur di medan perang menyisakan penderitaan ekonomi dan sosial bagi para isteri ataupun anak yang ditinggal mati suami ataupun ayahnya. Dari sudut ekonomi, mereka kehilangan penanggungnya, dan dari aspek sosial para janda masih dianggap rendah dalam masyarakat.

¹⁶Quraish Shihab, *op.cit.*, jilid II, h. 328.

Dari sudut lain, kebolehan berpoligami juga dapat dianggap sebagai upaya pengikisan tradisi jahiliah yang nota bene masih tersisa sampai awal Islam. Masyarakat Arab jahiliah boleh berpoligami sebanyak yang diinginkan. Tradisi ini kemudian dihapus digantikan dengan pembatasan sampai empat orang isteri. Akan tetapi kebolehan menikah sampai empat bukanlah format ideal. Kebolehan ini hanya merupakan fase transisi atau tujuan antara menuju ke monogami sebagai pernikahan yang ideal. Itulah sebabnya sehingga ayat memberikan catatan kebolehan berpoligami harus dengan kemampuan berbuat adil, yang kemudian dinegasikan pada yang lain.

Berlalu masa Nabi atau berakhirnya problematika sosial yang diresonansi secara langsung ayat tersebut bukan berarti kebolehan berpoligami ditutup untuk tidak mungkin dibuka lagi. Dalam kondisi atau konteks yang serupa dengan dilandasi semangat yang sama, tentu saja poligami tetap terbuka. Kongkritnya, poligami dibolehkan dengan dua syarat yang harus diurut. Pertama, syarat kontekstual; artinya ketika konteks sebagaimana turunnya ayat ini terjadi maka poligami mungkin dilakukan. Kedua syarat orientasi; Keinginan berpoligami bukan untuk memenuhi kebutuhan seksual tetapi lebih pada niat serius untuk mengayomi perempuan. Ketidakmampuan laki-laki berbuat adil terhadap isteri-isterinya yang berkaitan dengan hal-hal psikologis dalam konteks seperti ini dapat ditolerir oleh Allah, dengan catatan ketidakadilan itu jangan terlalu didemonstrasikan. Sebaliknya, tingkah laku suami setidaknya harus memberikan kesan usaha maksimal untuk berbuat adil meski hal itu tidak akan pernah terwujud.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muh., *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ali Enggineer, Asgar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan oleh Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf, dari *The Rights of Women in Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2003).
- Abu Zaid, Nashr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulum Al-Qur'an*, Terjemahan oleh Khoiron Nadhliyyin dari *Maqhum an-Nash; Dirasah fi Ulum Al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Al-Jurjawi, A., *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*,
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid II, Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera Hati
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.